

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, Amerika Serikat memiliki sumber daya berupa energi yang berasal dari fosil, seperti minyak, gas, batubara dan juga didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan teknologi (*Fracking*) yang membantu memudahkan proses produksi energi tersebut. Dengan bermodalkan sumber daya ini, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memiliki ambisi untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu *Make America Great Again*. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut dalam sektor energi, Donald Trump mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan AFEP (*America First Energy Plan*).

Penulis menemukan Amerika Serikat memiliki respon yang berbeda-beda terhadap isu perubahan iklim, tergantung kepentingan nasional apa yang di bawa oleh presidennya. Seperti yang disinggung oleh Krasner, di dalam rezim dapat terjadi perubahan setiap kali terjadi pergeseran *power* dan *interest*. Tindakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump ini dapat digambarkan sebagai pergeseran *power* dan *interest* dalam rezim iklim internasional yang dapat memberikan kemungkinan untuk melemahkan upaya global dalam melawan perubahan iklim.

Tindakan Amerika Serikat ini dapat dijelaskan melalui kepentingan nasional yang di bawa Donald Trump yaitu, *Make America Great Again*. Dalam ilmu hubungan internasional, asumsi paling mendasar yang menggambarkan perilaku internasional adalah anarki, dengan tujuan *Make America Great Again* Amerika Serikat menjadi “abai” terhadap rezim iklim internasional, karena untuk mencapai dominasi energi Amerika Serikat perlu menghilangkan regulasi-regulasi yang menekan produksi energi fosil,

sedangkan jika Amerika Serikat mengikuti keteraturan yang ada di dalam rezim iklim internasional, maka produksi energi fosil harus mulai ditekan karena merupakan penyebab utama perubahan iklim.

Dalam implementasi AFEP Amerika Serikat telah melakukan beberapa tindakan untuk mencapai dominasi energinya, seperti membuka izin pengeboran suaka margasatwa arktik yang sebelumnya dilarang untuk tempat produksi minyak karena dapat membahayakan habitat hewan-hewan yang berada di suaka tersebut, memberi izin terhadap perusahaan TransCanada untuk kembali melanjutkan proyek Keystone XL Pipeline yang sebelumnya dilarang oleh kepemimpinan Obama karena proyek ini dilaporkan dapat mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar lagi bagi Amerika Serikat, keluar dari perjanjian internasional *Paris Agreement*, serta mengubah lebih dari 100 regulasi yang menghambat produksi energi fosil. Jika merujuk pada perkataan Dr. Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Public Policy* maka implementasi seperti ini disebut dengan implementasi kebijakan *derivate*.

Penulis juga menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan AFEP terdapat “fragmentasi”. Hal ini dikarenakan administrator EPA yang baru yaitu Scott Pruitt, sebelumnya menggunakan dana kampanye yang berasal dari industri bahan bakar fosil sebanyak 300.000 USD. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya tekanan yang datang dari kepentingan para donator, sebab semasa Pruitt menjabat banyak 100 regulasi yang melonggarkan produksi energi fosil telah dilaksanakan oleh EPA. Serta sebanyak 22 senator yang berasal dari partai republik mengirim surat kepada Donald Trump untuk segera keluar dari *Paris Agreement*. Diketahui bahwa ke 22 senator ini memiliki keuntungan finansial yang berasal dari industri bahan bakar fosil. Tentunya ini merupakan tekanan yang datang dari kelompok kepentingan ataupun komite legislatif yang mempengaruhi kebijakan, sehingga hal ini disebut sebagai “fragmentasi”.

Dengan diberlakukannya AFEP, terjadi peningkatan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat dalam sektor bahan bakar fosil, serta menyebabkan tingkat ekspor minyak mentah Amerika Serikat lebih tinggi daripada tingkat impor, hal ini pertama kalinya dalam 75 tahun sejarah Amerika Serikat sebagai negara yang bergantung pada minyak timur tengah. Tentunya ini dilakukan Trump sebagai wujud dalam mencapai dominasi energi untuk Amerika Serikat.

Penulis melihat, kedua partai besar di Amerika Serikat yakni partai republik dan partai demokrat, memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana pandangan dan respon negaranya terhadap beberapa isu, salah satunya adalah isu perubahan iklim. Merujuk secara historis, lima masa kepemimpinan Amerika Serikat kebelakang, berasal dari partai yang berbeda-beda. Pola seperti ini menyebabkan tidak adanya konsistensi dari Amerika Serikat. Seperti saat Presiden Clinton mulai mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah yang menekan produksi energi fosil, kembali dibuka oleh presiden Bush Junior, terjadi lagi ketika Barrack Obama membuat kebijakan CAP, kemudian diganti menjadi AFEP oleh Donald Trump. Kejadian ini tentunya berdampak buruk bagi rezim iklim internasional mengingat Amerika Serikat merupakan negara Annex 1 dan memiliki tanggung jawab secara historis terkait perubahan iklim.

Terakhir penulis menemukan bahwa kebijakan AFEP terkesan membelakangi isu perubahan iklim, namun menjadi instrument bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Machiaveli pernah mengatakan negara bisa saja mengabaikan kepentingan bersama, moralitas, norma-norma internasional tertentu, karena negara hanya tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. Pandangan Machiaveli terjadi dalam kasus Amerika Serikat, ketika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump fokus untuk mencapai dominasi energi,

mereka telah mengabaikan norma-norma internasional dalam melawan perubahan iklim.

6.2 Saran

Melalui hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian penulis memberikan rekomendasi yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan serupa.

Amerika Serikat dalam kepemimpinan Donald Trump memang mengambil tindakan yang abai terhadap perubahan iklim, penelitian ini dilandasi oleh kebijakan AFEP dan fokus pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini hanya melihat dari sebelah sisi di mana penjabaran implementasi AFEP dan bagaimana isi dari kebijakan tersebut, namun di satu sisi juga terdapat publik Amerika Serikat yang menentang setiap tindakan atau aturan dalam AFEP. Sehingga penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk turut melengkapi pembahasan dari sisi yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Selanjutnya, Amerika Serikat telah melakukan pemilihan presiden pada 2020 lalu, Joe Biden kini menjadi Presiden baru Amerika Serikat. Karena Biden merupakan Presiden yang berasal dari partai demokrat, penulis juga merekomendasikan untuk meneliti kebijakan energi dan iklim seperti apa yang diambil oleh Presiden yang berasal dari partai demokrat tersebut.

Sedikit saran untuk teman-teman Hubungan Internasional, sebagai mahasiswa HI kita perlu melihat suatu isu, lalu bagaimana negara merespon isu tersebut. Ini bisa dilihat dari kebijakan yang diambil oleh sebuah negara. Penulis menyarankan untuk teman-teman HI agar mengeksplorasi kebijakan sebuah negara terkait suatu isu, karena kita akan menemukan dinamika-dinamika HI yang memiliki ruang untuk di analisis.